

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yang terus meningkat setiap tahun. Pertumbuhan penduduk ini diiringi oleh perkembangan industri dan perekonomian di wilayah perkotaan. Pada awal abad ke-21, penduduk perkotaan di negara berkembang akan mencapai 40% dari total penduduk. Dalam perkembangan kota di Indonesia, terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, yang sering tidak dapat diantisipasi oleh kemampuan kota dalam menyediakan fasilitas kehidupan bagi warganya (Rahmawati, 2019).

Tabel 1. Proyeksi Tingkat Urbanisasi di Indonesia, 2010-2035.

Tahun	Tingkat Urbanisasi (%)
2010	49,8
2015	53,3
2020	56,7
2025	60,0
2030	63,4
2035	66,6

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020.

Pertumbuhan penduduk yang pesat ini memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah peningkatan volume sampah. Semakin banyak penduduk, semakin tinggi tingkat konsumsi, yang pada akhirnya menghasilkan komposisi sampah yang beragam. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan bahan buangan

yang berbentuk padat atau semi-padat dari aktivitas manusia maupun hewan yang dibuang karena tidak memiliki manfaat lagi (Tchobanoglous, 1993).

Pertumbuhan penduduk tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat tetapi juga meningkatkan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya (Manulangga, 2022). Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (Madani, 2011). Sistem pengumpulan sampah yang tidak efektif, kurangnya alat angkut, minimnya Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan terbatasnya kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi isu krusial yang mencakup aspek teknis, sosial, dan budaya (Astuti, 2011). Sampah perkotaan akan tetap menjadi salah satu persoalan rumit yang dihadapi oleh pengelola kota dalam menyediakan sarana dan prasarananya (Martin, 2003). Contoh terbesar pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia berada di DKI Jakarta dimana penduduk Indonesia sebagian besar melakukan urbanisasi ke daerah metropolitan tersebut untuk mengadu nasib dengan kerasnya kehidupan di era global.

Saat ini hampir setiap kegiatan manusia pasti menghasilkan sampah. DKI Jakarta menghasilkan sekitar 3.141.648,02 ton sampah pada tahun 2023. Jakarta Timur mendominasi dengan volume timbulan sampah mencapai 851.611,46 ton atau setara dengan 27,11% dari total volume timbulan sampah yang dihasilkan DKI Jakarta. Berikutnya, Jakarta Barat dengan volume timbulan sampah 748.135,24 atau setara dengan 23,81%. Jakarta Selatan menempati urutan ke 3 yaitu dengan volume timbulan sampah 719.463,79 ton atau 22,90%. Volume timbulan sampah Jakarta Utara tercatat sebanyak 504.560,46 ton atau 16,06%. Kemudian, Jakarta Pusat sebanyak 311.242,80 atau 9,91%. Sementara, Kepulauan Seribu dengan 6.634,27 ton atau 0,21% yang merupakan wilayah dengan volume timbulan sampah paling sedikit di DKI Jakarta (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024).

Jakarta Selatan, sebagai salah satu wilayah administratif di DKI Jakarta, mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Jakarta Selatan mencapai 2.244.623 jiwa, dengan penambahan sekitar 10.768 jiwa dari tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2024). Pertumbuhan

populasi ini tentunya membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan kota, termasuk meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Pada tahun 2023, Jakarta Selatan menghasilkan sekitar 719.463,79 ton sampah, menjadikannya sebagai salah satu kontributor utama sampah di DKI Jakarta.

Upaya untuk mengelola sampah telah dilakukan oleh pemerintah Jakarta Selatan dengan membangun Tempat Penampungan Sementara Sampah (TPS). Namun, ada kekhawatiran mengenai apakah jumlah TPS di Jakarta Selatan sudah terdistribusikan dengan baik dan tersebar secara merata di seluruh wilayah. Selain itu, masih belum jelas apakah TPS tersebut dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana kondisi pengelolaan sampah di lapangan. Walaupun sudah terdapat TPS Eksisting, timbulan sampah termasuk sampah yang dibuang sembarangan, volumenya masih mencapai 30-40% dari total timbulan sampah di Jakarta Selatan (Sony, 2024). Kemudian, kapasitas TPS yang sudah ada masih banyak yang belum menampung volume sampah sehingga terjadi tumpukan diluar area TPS, yang mengganggu aktivitas masyarakat, lingkungan, dan estetika area sekitar TPS. Hal ini tidak hanya memperburuk kondisi lingkungan, mengganggu estetika, tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti banjir, pencemaran air, dan meningkatnya risiko penyakit.



Gambar 1. Pembuangan Sampah di Sungai Ciliwung (Penelitian 2024).

Adapun contoh kasus mengenai kurang maksimalnya TPS dalam menangani sampah yakni terjadi di TPS Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Berdasarkan laporan (Izan, 2024), terdapat beberapa masalah yang menyebabkan TPS di depan Lokasi Binaan Pasar Minggu di Jakarta Selatan belum berjalan secara maksimal. Salah satunya adalah kondisi TPS yang terbuka, sehingga sulit untuk mengendalikan perilaku warga agar tidak membuang sampah di tempat yang tidak semestinya. Meskipun telah diberlakukan larangan membuang sampah melebihi batas waktu dan denda bagi pelanggarnya, namun masih banyak warga yang melanggar aturan tersebut. Selain itu, kurangnya penanganan sampah di lingkungan sekitar juga menjadi faktor penyebab, sehingga warga terpaksa membuang sampah di tempat yang tidak semestinya. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah setempat untuk meningkatkan pengambilan sampah setiap hari, namun masih diperlukan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, petugas kebersihan, dan masyarakat agar masalah sampah di TPS tersebut dapat terselesaikan secara maksimal.

Kasus lain mengenai ketidaksesuaian lokasi TPS yaitu penutupan TPS Lapangan Ros di Kelurahan Bukit Duri. Lokasinya yang berada tepat di depan halte TransJakarta, bus stop Jaklingko, dan di belakang Stasiun Tebet, mengakibatkan gangguan signifikan terhadap lalu lintas yang padat di area tersebut. Selain itu, sejak tahun 2013, sembilan TPS telah ditutup karena lokasinya yang berada di bantaran Kali Ciliwung. TPS yang terletak sangat dekat dengan sungai dapat mencemari air akibat sampah yang terbawa air hujan atau air sungai yang meluap. Selain itu, keberadaan TPS di dekat sungai berpotensi menyumbat aliran air, yang dapat memperburuk masalah banjir (KIP JS, 2024).

Masalah sampah di Jakarta Selatan masih menjadi isu yang belum terselesaikan. Mengingat pentingnya peran TPS dalam sistem pengelolaan sampah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberadaan dan kondisi TPS eksisting di Jakarta Selatan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi TPS eksisting di Jakarta Selatan, sehingga dapat diambil

langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana laju timbulan sampah di Jakarta Selatan?
2. Bagaimana kondisi aktual Tempat Penampungan Sementara Sampah (TPS) di Jakarta Selatan?
3. Apakah TPS eksisting di Jakarta Selatan sudah memenuhi kriteria dari peraturan yang berlaku?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi dalam batasan masalah yaitu: untuk menganalisis dan mengevaluasi Tempat Penampungan Sementara Sampah (TPS) di Jakarta Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi Tempat Penampungan Sementara Sampah (TPS) di Jakarta Selatan?”.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca mengenai kriteria Tempat Penampungan Sementara Sampah (TPS) berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan menjadi salah satu sumber pengetahuan dan wawasan sehingga memberikan keluasan pengetahuan berdasarkan fakta dan teori yang telah dipelajari.
- b. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengkajian mengenai Tempat Penampungan Sementara Sampah (TPS) dan pengelolaan sampah.
- c. Bagi pemerintah, diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta membangun infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan persampahan demi kebaikan masyarakat.